

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera seperti yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV. Pembangunan nasional merupakan suatu kehendak untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Namun Pesatnya perkembangan pembangunan pada saat ini masih terpusat hanya di kota-kota besar. Pembangunan yang cenderung dilakukan di daerah perkotaan ini memiliki daya tarik dan menjadi penyebab banyaknya penduduk yang dari desa berpindah ke daerah perkotaan dengan tujuan untuk menciptakan keadaan ekonomi yang lebih baik dan tentunya hal ini menjadi salah satu pemicu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang ada di kota. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan ini menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa kehidupan di perkotaan tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilisasi penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan publik yang baik.

Transportasi sebagai salah satu pendukung dalam mobilitas penduduk di perkotaan memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan dalam bidang ekonomi, tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Menurut Salim (2000), transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi yang dimaksudkan untuk mempercepat mobilisasi penduduk ini tidak selalu berjalan dengan

baik yang diakibatkan oleh lalu lintas yang semakin padat. Kondisi ini juga terkait terhadap sistem transportasi yang ada dan system perparkiran ini merupakan elemen penting dari sistem transportasi tersebut.

Dengan berkembangnya jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan parkir kendaraan semakin tinggi. Jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Ringkasan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Berdasarkan Data BPS Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015-2017

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truck	Sepeda Motor
2015	506	35	512	11096
2016	546	43	563	13187
2017	608	41	657	14802

Sumber: Diishub Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan data badan pusat statistic (BPS) Kabupaten Manggarai Timur pada tabel di atas menggambarkan adanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dalam tiap Tahun. Akan tetapi hal ini tidak dibarengi dengan penataan kawasan parkir yang memadai, yang kemudian memicu munculnya kawasan kantong parkir ilegal yang dikelola oleh juru parkir liar. Kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan dan problematika dalam penertiban kawasan parkir.

Masalah transportasi tidak hanya terkait pada sistem dan penyediaan layanan sarana dan prasarana angkutan yang memadai, modern dan manusiawi tetapi juga terkait dengan perilaku pengguna jalan dan jasa transportasi serta peran masyarakat. Perilaku pengguna jalan yang disebut juga dengan etika berlalu lintas adalah tingkah laku pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undangdan peraturan serta norma berlalu lintas antara sesama pemakai jalan. Betapapun majunya sistem transportasi yang dibangun dengan

sarana dan prasarana memadai tanpa disertai oleh perilaku positif dan peran serta masyarakat maka masalah transportasi tidak ada perubahan yang berarti. Sebagai pengguna dalam berkendara wajib mematuhi tata tertib lalu lintas, rambu rambu jalan dan tanda lalu lintas jalan. Kepadatan arus lalu lintas jalan salah satu penyebabnya adalah tidak disiplinnya pengguna jalan, baik perilaku berkendara maupun pejalan kaki.

Perilaku masyarakat yang cenderung mengabaikan peraturan berlalu lintas sangat berdampak terhadap kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Salah satu kebiasaan masyarakat yang mengganggu kenyamanan berlalu lintas yaitu parkir disembarang tempat akibatnya menimbulkan kemacetan. Kecenderungan mengabaikan aturan lalu lintas menjadi sebuah budaya dalam masyarakat tersebut. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama kota yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangny kebutuhan jalan dengan kepadatan kendaraan. Salah satu penyebab kemacetan mulai muncul yaitu akibat dari tempat parkir penuh dan juga merupakan dampak dari perilaku masyarakat sebagai pengguna jalan sebagai berikut:

1. Sikap mental sebagian masyarakat pengguna jalan yang kurang disiplin
2. Menjamurnya pedagang kaki lima, pedagang asongan di badan jalan dan di persimpangan jalan.
3. Adanya pengendara mobil yang bergerak lambat untuk mencari lahan parkir kosong.
4. Kemacetan lalu lintas yang disebabkan karena kepanikan seperti adanya syarats irene.

5. Beberapa pengendara menunggu di lajur lalu lintas saat menunggu peluang mendapat ruang parkir.

6. Beberapa pengendara memarkirkan kendaraannya di zona larangan parkir.

Berkaitan dengan juru parkir Pada dasarnya setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan ini misalnya parkir kendaraan di tepi jalan umum. Memang ada fasilitas parkir yang memanfaatkan ruang milik jalan, namun hanya di jalan-jalan yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan kawasan pengendalian parkir. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar tata cara berhenti dan Parkir dapat diberikan sanksi namun adanya sanksi ini tidak bisa secara keseluruhan mengubah pola perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Sistem perparkiran dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan adanya juru parkir, juru parkir bertugas sebagai pengawas dan mengatur perparkiran dengan baik. Bertambahnya tingkat pengguna kendaraan berbanding lurus dengan tingginya permintaan akan lahan parkir dan hal ini menjadi faktor pendukung timbulnya juru parkir di berbagai tempat. Bertambahnya kebutuhan akan ruang parkir tidak disertai dengan penempatan juru parkir yang resmi di setiap ruang parkir, akibatnya menimbulkan banyaknya juru parkir liar yang mengelola sistem parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti pengadaan tarif retribusi yang dimana tarif pada kendaraan bermotor tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tidak adanya pemberian karcis bagi pengguna jasa perparkiran serta kurangnya tanggung jawab juru parkir dalam melayani pengguna jasa parkir.

Apabila dibandingkan dengan data luas lahan parkir yang tersedia perkiraan jumlah tahun depan, maka disimpulkan bahwa lahan parkir yang tersedia sekarang kurang

memadai. Apabila presentase terus bertambah dengan jumlah pengguna tahun depan maka di perkirakan jumlah lahan parkir yang sekarang kurang memadai. Konsumsi terhadap alat transportasi untuk roda dua dan empat semakin meningkat, kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayanan publik untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi masyarakat.

Fakta menunjukan bahwa, semakin dekat pergerakan menuju pusat Kabupaten Manggarai Timur akan semakin banyak menemui hambatan berupa kemacetan arus lalu lintas pada saat mengemudi kendaraan, salah satu penyebab adalah parkir pada badan jalan. Contohnya pada kawasan pertokoan Waereca hingga Kampung Baru terutama pada jam-jam sibuk ketika aktivitas masyarakat menuju ke tempat kerja, ke sekolah, ke rumah sakit dan ke tempat tujuan lainnya yang melewati kawasan tersebut.

Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah pengguna jalan raya, dan meningkat pula kebutuhan akan ruang parkir. Kondisi parkir saat ini sangat memperhatikan di beberapa kawasan antara lain Terminal Borong dan Pasar Borong. Berdasarkan obsevasi parkir di kedua lokasi tersebut di mana tidak ada petugas parkir resmi. Akibatnya kemacetan terjadi pada jam tertentu/jam padat aktivitas, yakni pada jam 07-10 pagi Di Pasar Borong. Kemacetan yang terjadi cukup parah akibat parkir liar dan aktivitas perdagangan di badan jalan. Kondisi yang sama juga terjadi di area lain di mana tidak ada papan parkir, seperti di pertokoan, Hotel Perimadona, kawasan kantor pemerintahan dan pusat perbelanjaan Pancaran.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu Kabupaten yang juga tengah mengalami persoalan terkait perpakiran. Untuk mengatasi masalah tersebut

Kabupaten Manggarai Timur penataan dan pengelolaan kawasan parkir di tepi jalan umum. Adapun instansi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ditunjukan yang menjadi penanggung jawab teknis tertentu di tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan melalui unit pelaksanaan teknis (UPT) pengelola parkir. UPT pengelola parkir sebagai unsur pelaksanaan mempunyai tugas pokok dalam memberi petunjuk, membagi petugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan parkir.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Manggarai Timur memiliki banyak tantangan terkait penataan parkir dalam kota. Hal ini yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Strategi Dinas Perhubungan Dalam Upaya Penertiban Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Manggarai Timur.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana Strategi Dinas Perhubungan Dalam Upaya Penertiban Parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Manggarai Timur?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Perhubungan dalam upaya menertibkan Parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Manggarai Timur.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur dalam upaya penertiban parkir di tepi jalan umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan strategi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Manggarai Timur.

2. Secara praktis

Bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan untuk memperbaiki kinerja Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Manggarai Timur.